



Giatkan Pengawasan Produk Ternak

YOGYA (MERAPI) - Meskipun wilayah perkotaan bukan daerah peternakan, tapi kewaspadaan untuk mencegah penyakit antraks tetap harus dilakukan. Terutama pada produk hewan berupa daging yang masuk ke wilayah kota. Pengawasan produk ternak itu perlu dikuatkan, karena pengawasan lalu lintas ternak dinilai belum efektif.

"Kota Yogyakarta memang bukan daerah peternak sehingga potensi antraks ke hewan juga sedikit. Tapi fokus pengawasannya pada produk ternaknya yakni daging, harus sesuai mutu pengawasan," kata Epidemiologis Balai Besar Veteriner Wates, DIY drh Putut Djoko Purnomo di sela pertemuan para dokter Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, terkait antraks, di Balaikota Rabu (1/2).

Dia menjelaskan pengawasan terhadap produk ternak bisa dilakukan melalui Rumah Potong Hewan (RPH) di Yogyakarta. Petugas di RPH harus memeriksa seluruh ternak yang akan dipotong untuk memastikan kesehatan ternak sehingga layak konsumsi.

Dia menyebut pada ternak yang terindikasi antraks akut akan mengeluarkan darah pada bagian tubuhnya yang berlubang dan pembengkakan pada limpa. Namun ketika ternak sudah

dipotong menjadi daging sulit dikenali terindikasi antraks atau tidak.

"Secara fisik memang susah kalau sudah dalam bentuk potongan daging. Jadi tugas RPH ini penting memeriksanya. Jangan sampai ada ternak terindikasi antraks masuk RPH," paparnya.

Dia menyatakan kasus antraks di Kulonprogo sudah terkonfirmasi kebenarannya dan saat sedang dalam proses pengendalian. Langkah yang dilakukan komunikasi dan vaksinasi massal, penegakan lalu lintas ternak dan pemantauan aktif.

Dia sementara menduga penyakit antraks di Kulonprogo itu disebabkan karena lalu lintas perjalanan ternak antardaerah. Sesuai aturan, setiap lalu lintas ternak harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dan uji laboratorium sesuai permintaan pembeli.

"Secara umum pemantauan lalu lintas ternak belum efektif dari sisi kesehatan untuk menangkal penyakit. Hanya untuk menarik retribusi. Kecenderungannya (pembawa ternak) *ngeblong* langsung terus lewat dan melalui jalur-jalur tikus sehingga tidak terpantau," terang drh Putut.

Sementara itu, Kepala Seksi Penga-

wasan Mutu Komoditas dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Endang Finiarti mengungkapkan selama ini belum pernah ada kasus antraks di Kota Yogyakarta. Meski demikian pihaknya tetap waspada kemungkinan penyakit itu masuk ke ternak maupun produk ternak di Yogyakarta.

"Populasi sapi di Kota Yogyakarta ada sekitar 100 ekor tersebar di kelompok ternak di Kecamatan Kotagede dan Tegalrejo. Kami ada grup untuk memudahkan komunikasi jika ada kejadian pada ternak," kata Endang.

Menurutnya salah satu kesulitan mencegah antraks adalah lalu lintas ternak yang seringkali tidak dilengkapi dengan surat kesehatan hewan. Dia mengutarakan, dulu untuk menjual hewan ternak seperti sapi membutuhkan surat keterangan dari kelurahan. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Namun harus ada surat keterangan kesehatan.

Untuk RPH Yogyakarta di Giwangan pihaknya memastikan ternak yang masuk telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong. Setiap harinya RPH Giwangan, memotong ternak sekitar 13 -15 ekor sapi. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005